



STRATEGI MENJERAT PEMILIK MANFAAT KORPORASI PADA KASUS TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM

R. NARENDRA JATNA

Diskusi online

Keterbukaan Beneficial Ownership Dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan
Sumber Daya Alam

Auriga Jakarta 13 Desember 2020

TUJUAN PENUNTUTAN

- Konservasi vs Eksploitasi
- In rem vs In Personam

BENTUK DELIK

- Delik Formil
- Delik dolus
- Delik culpoos
- Administratif penal
- Economische delicten

Natuurlijke Persoon dan Rechtspersoon

- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Keadilan retributif: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*
- Korpo: berbadan
- PT, CV, Yayasan, Perkumpulan, Listed Co
- Organised crime
- Association de malfeiture

Penyidikan Multidoors

- Pintu masuk tp lain (concurus realis)
 - TP Kehutanan
 - TP Perusakan Hutan
 - TP Lingkungan Hidup
 - TP Kepabenan
 - TP Konservasi Sumder Daya Hayati
 - TP Pencucian Uang
 - TP Korupsi
 - TP Perikanan
 - TPPO dll
- REZIM PENYIDIKAN YANG BERBEDA
- HUKUM ACARA YANG BERBEDA
- PENGADILAN UMUM/KHUSUS
TIPIKOR/PERIKANAN

KEJAHATAN LINTAS NEGARA

- SDA? Kehutanan? Lingkungan Hidup,? Pencucian Uang?
- Hukum domestik?
- Administratif Penal
- Double criminality

SDA DAN PENCUCIAN UANG

- Satu feit = dakwaan subsidiaritas/alternatif
- Dua feit = dakwaan kumulatif

Personil pengendali korporasi

- UU pencucian uang
- Kejahatan lintas negara
- Double criminality
- Dakwaan kumulatif

Rezim special court

- pengadilan perikanan/korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan/korupsi
- pengadilan khusus berada dalam lingkungan peradilan umum
- Pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual serta PN Tipikor di Ibu Kota Provinsi
- Pengadilan perikanan /korupsi berkedudukan di pengadilan negeri
- Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing
- Azas territorial
- Pencucian uang?

Rezim Special Chamber

- Hakim spesialis di setiap pn atau pn tertentu
- Sepanjang dalam dakwaan didakwakan tp perikanan/tipikor
- Hukum acara yang berbeda?
- Penyidik yang berbeda?

LEX SPECIALIS SYSTEMATIS

- Subyek Khusus
- Hukum Acara Khusus
- Tujuan dibentuknya UU

Perluasan Pertanggungjawaban Pidana

- Penggunaan personil pengendali korporasi
- Kumulasikan dengan pencucian uang
- Pembentukan rezim special chamber untuk perkara perikanan/tipikor

STRATEGI PENUNTUTAN

- Manajemen waktu
- Dakwaan kumulatif
- Splitising
- Multidoors approach: penyidik, alat bukti, saksi